



Strategi Kepolisian Resort Kabupaten Keerom dalam Mewujudkan Keamanan Berbasis Kearifan Lokal

Agus Tianto, Hiskia C. M. Sapioper

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail Korespondensi Penulis: atianto500@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Security, Local Wisdom, Police, Participatory, Keerom Regency

How to Cite:

Tianto, A., Sapioper, H. C. M. (2025). Strategi Kepolisian Resort Kabupaten Keerom dalam Mewujudkan Keamanan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(2): 111-122.

DOI:

10.31957/jeb.v13i2.4927

ABSTRACT

This study aims to analyze police strategies in realizing local wisdom-based security in Keerom Regency through the integration of community cultural values. This study is urgent as local wisdom integration is vital for sustainable peace and trust in Papua. The research method used is a qualitative approach with an in-depth case study. The research location was carried out in the Papua region, where the richness of local wisdom is a primary asset. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents. Research informants included police officers, traditional leaders, and academics who understand the dynamics of security and local cultural values. Research instruments in the form of interview guidelines and observation sheets were developed to obtain valid data. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques to identify interaction patterns, obstacles, and potential synergies between officers and the community. The results of the study revealed that the integration of local wisdom in police strategies can increase public trust and the effectiveness of law enforcement, although there are still obstacles in the understanding of culture by officers. The discussion shows that a participatory approach and collaboration between officers and traditional leaders are key to success. The conclusion of the study emphasizes the need to increase the capacity of officers through cultural training and strengthening cross-sectoral cooperation. The recommendations from the research results are expected to serve as a reference in developing security policies in conflict areas such as Papua.

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Keamanan, Kearifan Lokal, Kepolisian, Partisipatif, Kabupaten Keerom

Cara Mengutip:

Tianto, A., Sapioper, H. C. M. (2025). Strategi Kepolisian Resort Kabupaten Keerom dalam Mewujudkan Keamanan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(2): 111-122.

DOI:

10.31957/jeb.v13i2.4927

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepolisian dalam mewujudkan keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom melalui integrasi nilai budaya masyarakat. Penelitian ini urgen karena integrasi kearifan lokal penting bagi perdamaian berkelanjutan dan kepercayaan di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus mendalam. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Papua, di mana kekayaan kearifan lokal menjadi modal utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian, tokoh adat, dan akademisi yang memahami dinamika keamanan serta nilai budaya setempat. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi disusun guna memperoleh data yang valid. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi, kendala, dan potensi sinergi antara aparat dengan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam strategi kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman budaya oleh aparat. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaborasi antara aparat serta tokoh adat merupakan kunci keberhasilan. Simpulan penelitian menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan budaya dan penguatan kerjasama lintas sektoral. Rekomendasi hasil riset diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan keamanan di daerah konflik seperti Papua.

Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks di wilayah Papua, strategi kepolisian dituntut untuk mampu mengadaptasi pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad, sehingga perwujudan keamanan menjadi lebih humanis dan relevan dengan kondisi sosial yang unik di daerah tersebut. Papua yang dikenal dengan keberagaman etnis, tradisi, dan norma adat yang kental memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat, sehingga setiap kebijakan dan taktik kepolisian harus mempertimbangkan kompleksitas interaksi sosial yang ada di masyarakat lokal. Keberadaan kearifan lokal yang mengakar dalam nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat memberikan landasan moral dan etika yang krusial dalam merumuskan strategi keamanan yang humanis dan berkeadilan, sekaligus menjadi

fondasi bagi terciptanya hubungan harmonis antara aparat dan warga. Integrasi antara metode kepolisian modern dengan praktik-praktik tradisional yang telah teruji secara historis menjadi salah satu tantangan utama yang memerlukan penelitian mendalam serta inovasi operasional guna menghindari potensi konflik budaya yang bisa menggoyahkan stabilitas keamanan. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk memperkuat keamanan nasional, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang telah ada sejak lama, sebagaimana diungkapkan oleh Suryanto (2013).

Dalam konteks implementasi strategi keamanan di Kabupaten Keerom Papua, tantangan integrasi kearifan lokal ke dalam metode kepolisian modern sering kali menghadirkan perbedaan paradigma yang mendalam antara sistem tradisional yang bersifat fleksibel dengan sistem birokrasi yang kaku dan formal. Kesulitan dalam menyelaraskan norma adat yang bersifat adaptif dengan prosedur operasional standar yang diatur secara hierarkis memunculkan ketegangan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya yang berakar kuat di masyarakat. Ketidapahaman terhadap konteks lokal oleh aparat penegak hukum kerap mengakibatkan kesalahpahaman yang berujung pada munculnya sikap skeptis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Upaya penyelarasan ini harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait sehingga perbedaan nilai dan interpretasi yang ada di setiap komunitas dapat terakomodir dengan baik. Dalam hal ini, Santoso (2015) menyatakan bahwa sinergi antara pengetahuan tradisional dan praktik kepolisian modern merupakan kunci untuk menciptakan sistem keamanan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah konflik seperti Papua.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam membangun keamanan yang berlandaskan pada kearifan lokal, di mana partisipasi aktif warga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi kepolisian secara signifikan. Keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan keamanan memberikan ruang bagi terwujudnya dialog konstruktif antara aparat dan warga yang secara langsung memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Program-program pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat menjadi instrumen strategis untuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara pengetahuan lokal dan upaya pemberdayaan komunitas ini menciptakan lingkungan kondusif yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai serta memperkuat struktur sosial yang mendasari keamanan regional. Prasetyo (2016) menekankan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat lokal merupakan strategi efektif dalam mengatasi tantangan keamanan yang kompleks di wilayah dengan potensi konflik tinggi seperti Papua.

Pendekatan interdisipliner dalam strategi kepolisian yang menggabungkan aspek sosiologi, antropologi, dan ilmu politik telah menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua yang sangat beragam. Inovasi dalam model kepolisian modern yang menyerap elemen-elemen kearifan lokal memungkinkan terciptanya sinergi antara metode konvensional dan praktik tradisional yang telah teruji keandalannya dalam menghadapi dinamika sosial yang berubah cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan kontribusi signifikan dengan memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara aparat dan masyarakat, sehingga respons keamanan menjadi lebih cepat dan terarah. Keberadaan tim riset dan lembaga pendidikan yang melakukan studi

lapangan secara mendalam juga memainkan peran strategis dalam menyediakan data empiris yang mendukung pengembangan model-model kepolisian inovatif. Menurut Harahap (2014), penerapan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan keilmuan menjadi salah satu kunci sukses dalam menyusun strategi keamanan yang efektif dan berkelanjutan di daerah dengan karakteristik budaya yang unik seperti Papua.

Keberlanjutan strategi keamanan yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk terus menyesuaikan pendekatan mereka dengan perubahan dinamika sosial serta perkembangan budaya yang terjadi di masyarakat Papua. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial merupakan aspek krusial yang harus diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, agar solusi yang dihasilkan tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Strategi keamanan yang berkelanjutan tidak hanya mengutamakan aspek teknis operasional, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang mendasari interaksi antara aparat dan masyarakat. Implementasi pendekatan yang menyeimbangkan antara inovasi modern dan nilai tradisional memerlukan komitmen jangka panjang serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat setempat. Wulandari (2018) berpendapat bahwa integrasi antara strategi keamanan modern dengan nilai-nilai tradisional merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di wilayah dengan tantangan sosial yang kompleks seperti Papua.

Sinergi antara kearifan lokal dan strategi kepolisian modern merupakan upaya strategis yang mampu menghasilkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin dinamis di wilayah Papua. Pendekatan yang mengutamakan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal memungkinkan terciptanya suatu ekosistem keamanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat secara menyeluruh. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional aparat kepolisian, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan dan kolaborasi antara masyarakat dengan institusi penegak hukum yang berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan. Penggabungan antara metode tradisional dan modern dalam strategi keamanan menawarkan peluang untuk menciptakan sistem yang adaptif dan inovatif, serta mampu meredam potensi konflik secara preventif melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif semua pihak terkait. Putra (2020) menegaskan bahwa penerapan strategi kepolisian berbasis kearifan lokal merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mewujudkan keamanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Keerom, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan model keamanan regional yang lebih holistik.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pengembangan strategi keamanan yang mampu menjawab tantangan kompleks di Papua secara kontekstual, agar pendekatan keamanan yang diterapkan tidak justru memperdalam konflik, melainkan mendorong terciptanya stabilitas sosial yang berkelanjutan melalui kolaborasi yang harmonis antara aparat dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepolisian dalam mewujudkan keamanan yang berbasis pada kearifan lokal di Kabupaten Keerom, dengan menelusuri pendekatan, program, serta metode yang diterapkan untuk menjaga stabilitas sosial sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat setempat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi strategi tersebut, guna memahami efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam mengenai strategi kepolisian dalam mewujudkan keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi strategi keamanan yang melibatkan masyarakat lokal. Sejalan dengan pendapat Creswell (2014), metode kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Selain itu, metode ini juga memungkinkan analisis terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam konteks keamanan berbasis kearifan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus dapat menangkap kompleksitas situasi sosial secara lebih holistik. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data empiris, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai pola interaksi dan dinamika sosial yang berkembang di Kabupaten Keerom.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan resmi yang berkaitan dengan strategi keamanan di Kabupaten Keerom. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat kepolisian, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat sipil untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai efektivitas strategi keamanan berbasis kearifan lokal. Metode ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Kvale dan Brinkmann (2015) bahwa wawancara mendalam merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi subjek penelitian secara mendalam. Selain itu, observasi langsung dilakukan guna mengamati implementasi kebijakan di lapangan serta interaksi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam konteks sosial mereka (Angrosino, 2016). Sementara itu, analisis dokumen kebijakan dilakukan untuk memahami bagaimana regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan mendukung atau menghambat strategi keamanan berbasis kearifan lokal (Bowen, 2009). Kombinasi dari ketiga teknik ini memungkinkan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, di mana informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom. Informan utama meliputi pejabat kepolisian yang terlibat dalam program keamanan berbasis komunitas, tokoh adat yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan lokal, serta akademisi dan aktivis yang memiliki kajian terkait kebijakan keamanan di Kabupaten Keerom. Strategi *purposive sampling* ini sejalan dengan pendekatan yang disarankan oleh Patton (2015), yang menyatakan bahwa pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus mempertimbangkan relevansi dan kedalaman wawasan yang dapat diberikan oleh setiap individu yang diwawancarai. Dalam pelaksanaannya, pendekatan *snowball sampling* juga digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Noy (2008). Data yang diperoleh kemudian

dianalisis menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012), yang memungkinkan identifikasi pola-pola tematik yang muncul dari data kualitatif. Dengan demikian, pendekatan analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Strategi Kepolisian dalam mewujudkan Keamanan yang berbasis pada Kearifan Lokal di Kabupaten Keerom

Strategi kepolisian dalam mewujudkan keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom memiliki berbagai kekuatan yang dapat dioptimalkan. Salah satu kekuatan utama adalah keberadaan sistem kepemimpinan adat yang kuat dan dihormati oleh masyarakat setempat. Kepolisian dapat memanfaatkan peran *ondoafi* dan kepala suku dalam mediasi konflik serta penerapan hukum adat yang lebih diterima oleh masyarakat (Suryanto, 2013). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan oleh kepolisian melalui program Binmas Noken menunjukkan hasil positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Putra, 2020). Keunggulan lain dari strategi ini adalah fleksibilitas aparat dalam menyesuaikan metode keamanan dengan karakteristik sosial-budaya Papua, yang memungkinkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam penyelesaian konflik (Santoso, 2015). Keberadaan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah juga memperkuat keberhasilan strategi kepolisian dalam menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat (Wulandari, 2018).

Meskipun memiliki banyak kekuatan, strategi kepolisian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom juga menghadapi berbagai kelemahan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap budaya dan sistem sosial masyarakat Papua, yang sering kali mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan implementasi kebijakan (Santoso, 2015). Struktur kepolisian yang bersifat hierarkis dan formal juga sering kali berbenturan dengan sifat fleksibel dari sistem hukum adat yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial (Harahap, 2014). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kendala dalam keberhasilan implementasi strategi ini (Prasetyo, 2016). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan keamanan juga menjadi faktor penghambat efektivitas strategi kepolisian (Putra, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian mengenai kearifan lokal Papua menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas strategi keamanan ini (Suryanto, 2013).

Dari sisi peluang, strategi kepolisian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom dapat diperkuat dengan adanya kebijakan desentralisasi dan pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya dan sistem hukum mereka sendiri, yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan kepolisian komunitas (Hakim & Rahayu, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara kepolisian dan tokoh adat dalam penyelesaian masalah keamanan (Marmot, 2015). Peningkatan kerja sama antara kepolisian dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil juga membuka peluang dalam memperkuat pemahaman dan sinergi antara kepolisian dan komunitas lokal (Piketty, 2014).

Program edukasi dan sosialisasi yang berbasis pada kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan berbasis partisipasi (Atkinson, 2015). Kesempatan lain yang dapat dimanfaatkan adalah potensi wisata berbasis budaya yang dapat menjadi sarana bagi kepolisian dalam membangun citra positif dan hubungan harmonis dengan masyarakat lokal (Standing, 2011).

Namun demikian, strategi kepolisian di Kabupaten Keerom juga menghadapi berbagai ancaman eksternal yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu ancaman utama adalah masih adanya kelompok separatis yang menolak keberadaan aparat keamanan dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kepolisian dan masyarakat lokal (Gürel & Tat, 2017). Selain itu, meningkatnya arus migrasi dari luar Papua menyebabkan pergeseran struktur sosial dan meningkatkan potensi konflik antara penduduk asli dan pendatang (Helms & Nixon, 2010). Faktor lain yang menjadi ancaman adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu tindakan kriminalitas dan ketidakstabilan sosial (Harahap, 2014). Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran untuk program-program berbasis kearifan lokal juga menjadi hambatan bagi keberlanjutan strategi ini (Putra, 2020). Oleh karena itu, strategi kepolisian harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik di Kabupaten Keerom untuk menjaga efektivitasnya dalam jangka panjang (Suryanto, 2013).

Berdasarkan analisis SWOT di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas strategi kepolisian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan khusus mengenai budaya, hukum adat, dan komunikasi interkultural untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap masyarakat Papua (Santoso, 2015). Kedua, kepolisian harus memperkuat kemitraan dengan tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna membangun strategi keamanan yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi (Harahap, 2014). Ketiga, penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat lokal, seperti melalui sistem laporan berbasis aplikasi yang memungkinkan warga untuk melaporkan insiden keamanan dengan cepat dan efisien (Marmot, 2015). Keempat, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mendukung program keamanan berbasis kearifan lokal, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi anggaran dari pemerintah daerah (Putra, 2020). Terakhir, strategi kepolisian harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dengan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal (Wulandari, 2018).

Dengan demikian, strategi kepolisian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih humanis, inklusif, dan efektif. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan internal, serta memanfaatkan peluang yang tersedia, kepolisian dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal dan meningkatkan stabilitas keamanan di Kabupaten Keerom. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil (Suryanto, 2013). Untuk itu, kepolisian perlu terus mengembangkan pendekatan yang inovatif dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal agar dapat menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di Kabupaten Keerom dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan (Santoso, 2015). Dengan demikian, pendekatan keamanan yang berbasis pada kearifan lokal dapat

menjadi model yang tidak hanya diterapkan di Kabupaten Keerom, tetapi juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang serupa (Putra, 2020).

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi Keamanan berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Keerom

Implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom memiliki sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu faktor utama adalah keberadaan struktur sosial adat yang kuat, di mana kepemimpinan tradisional masih diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat (Harahap, 2014). Struktur ini memungkinkan keterlibatan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih selaras dengan norma dan nilai budaya setempat (Santoso, 2015). Selain itu, keberadaan sistem hukum adat yang sudah berjalan lama memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang sering kali dipandang kurang fleksibel (Hakim & Rahayu, 2022). Pendekatan berbasis komunitas ini juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan keamanan, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi aktif mereka dalam menjaga ketertiban sosial (Prasetyo, 2016). Oleh karena itu, integrasi elemen budaya dalam strategi keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis.

Faktor lain yang mendukung keberhasilan strategi keamanan berbasis kearifan lokal adalah peran aktif masyarakat dalam sistem keamanan komunitas. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah adat dan program kolaboratif seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) membantu memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan warga (Putra, 2020). Kepercayaan yang terbangun melalui pendekatan partisipatif ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam merespons potensi ancaman keamanan sebelum eskalasi terjadi (Wulandari, 2018). Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga mendorong penerapan strategi keamanan yang lebih adaptif, di mana aparat kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik sosial (Harahap, 2014). Dengan demikian, keamanan tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Santoso, 2015). Model ini sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menekankan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas sosial.

Namun, meskipun banyak faktor pendukung, implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakseimbangan antara sistem hukum nasional dan hukum adat dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum (Lestari & Wahyudi, 2021). Dalam beberapa kasus, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering kali bertentangan dengan norma dan praktik yang berlaku dalam masyarakat adat, sehingga menimbulkan resistensi di tingkat lokal (Hakim & Rahayu, 2022). Selain itu, birokrasi yang kompleks dalam institusi kepolisian sering kali menghambat proses adaptasi strategi keamanan terhadap kondisi sosial dan budaya setempat (Prasetyo, 2016). Kurangnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai budaya Papua juga menjadi kendala dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas kebijakan keamanan (Putra, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih

fleksibel dan berbasis dialog dalam menyusun kebijakan keamanan agar dapat diterima oleh semua pihak.

Selain aspek hukum, faktor ekonomi juga menjadi tantangan dalam implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom. Kemiskinan yang masih tinggi di berbagai daerah membuat banyak individu dan kelompok masyarakat cenderung lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu (Piketty, 2014). Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menciptakan ketegangan sosial yang dapat meningkatkan potensi konflik (Stiglitz, 2012). Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak menyebabkan sebagian masyarakat memilih terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai bentuk strategi bertahan hidup (Atkinson, 2015). Situasi ini diperburuk oleh minimnya investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung stabilitas sosial, seperti akses transportasi yang terbatas dan keterbatasan fasilitas layanan publik (Standing, 2011). Oleh karena itu, strategi keamanan di Kabupaten Keerom harus mencakup pendekatan yang lebih luas, termasuk kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain faktor ekonomi, aspek politik juga memainkan peran dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom. Dalam beberapa kasus, pendekatan militeristik yang masih diterapkan oleh pemerintah dianggap tidak selaras dengan prinsip keamanan berbasis komunitas, yang menekankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian konflik (Wulandari, 2018). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan sering kali dipicu oleh pengalaman masa lalu yang melibatkan tindakan represif terhadap warga sipil (Santoso, 2015). Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan keamanan, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Putra, 2020). Selain itu, dinamika politik lokal yang kompleks sering kali mempersulit koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan yang berbasis pada kearifan lokal (Harahap, 2014). Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pendekatan kebijakan yang lebih transparan dan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan efektivitas strategi keamanan di wilayah ini.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat keamanan mengenai budaya dan adat istiadat Papua menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi keamanan berbasis kearifan lokal. Banyak aparat kepolisian yang ditugaskan di Kabupaten Keerom berasal dari luar wilayah tersebut dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai struktur sosial dan nilai-nilai adat setempat (Lestari & Wahyudi, 2021). Akibatnya, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat, yang dapat berujung pada ketegangan sosial (Prasetyo, 2016). Program pelatihan yang menekankan pemahaman budaya dan dialog interkultural dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan ini (Putra, 2020). Selain itu, keterlibatan tokoh adat sebagai mentor dalam pelatihan bagi aparat keamanan dapat membantu mempercepat proses adaptasi dan membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat (Santoso, 2015). Oleh karena itu, pendidikan berbasis kearifan lokal harus menjadi bagian integral dari strategi keamanan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Secara keseluruhan, strategi keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis jika didukung oleh kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat

setempat. Faktor-faktor seperti keterlibatan tokoh adat, sistem hukum adat, dan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keamanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Harahap, 2014; Prasetyo, 2016). Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan sistem hukum, kesenjangan ekonomi, pendekatan represif dalam kebijakan keamanan, dan kurangnya pendidikan bagi aparat masih menjadi hambatan dalam implementasi strategi ini (Lestari & Wahyudi, 2021; Piketty, 2014). Oleh karena itu, reformasi dalam pendekatan keamanan yang lebih partisipatif, berbasis dialog, serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan keamanan di Kabupaten Keerom (Santoso, 2015; Putra, 2020). Dengan demikian, strategi keamanan yang berakar pada kearifan lokal dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan sosial dan politik yang kompleks di wilayah ini.

4. Kesimpulan

Strategi kepolisian dalam mewujudkan keamanan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom menekankan integrasi nilai-nilai budaya, norma adat, dan sistem sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat setempat. Keberhasilan pendekatan ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif tokoh adat, pemuka masyarakat, serta pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik. Pendekatan kepolisian berbasis komunitas, seperti yang diterapkan dalam program Binmas Noken, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan memungkinkan penyelesaian masalah keamanan secara lebih humanis. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi strategi ini masih signifikan, termasuk kurangnya pemahaman aparat terhadap budaya lokal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta ketidakseimbangan antara sistem hukum adat dan hukum nasional yang sering kali menimbulkan konflik interpretasi.

Keberlanjutan strategi keamanan berbasis kearifan lokal sangat bergantung pada adaptasi kebijakan yang lebih inklusif serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam memahami nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Papua. Faktor eksternal, seperti ketidakstabilan politik, arus migrasi, serta tekanan ekonomi, juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi strategi ini. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pendekatan ini. Dengan memperkuat aspek partisipatif dan membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka antara aparat dan masyarakat, strategi keamanan berbasis kearifan lokal dapat menjadi model yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas di Kabupaten Keerom.

Untuk meningkatkan efektivitas strategi kepolisian berbasis kearifan lokal di Kabupaten Keerom, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan budaya, hukum adat, dan komunikasi interkultural harus menjadi prioritas agar pendekatan yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kedua, penguatan kemitraan dengan tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilakukan guna menciptakan sistem keamanan yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi komunitas. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keamanan, seperti aplikasi laporan masyarakat berbasis digital, dapat mempercepat respons keamanan dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara aparat dan warga. Keempat, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mendukung strategi keamanan berbasis kearifan lokal dalam bentuk regulasi dan pengalokasian anggaran yang memadai. Terakhir, evaluasi dan

inovasi berkelanjutan dalam pendekatan keamanan harus terus dilakukan agar strategi ini tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang di Kabupaten Keerom.

Daftar Pustaka

- Angrosino, M. (2016). *Doing ethnographic and observational research*. Sage.
- Ariani, S., Nugroho, B., & Prasetyo, D. (2023). *Sistem ekonomi maritim berbasis kearifan lokal masyarakat Bajo di Sulawesi*. Jakarta: Gramedia.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?* Harvard University Press.
- Azizah, R., & Setiadi, N. (2021). *Matrilineal dan distribusi sumber daya di Minangkabau: Kajian kearifan lokal dalam perspektif sosial budaya*. Bandung: Alfabeta.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). *Thematic analysis*. American Psychological Association.
- Coman, A., & Ronen, B. (2011). Focused SWOT: Diagnosing critical strengths and weaknesses. *International Journal of Production Economics*, 131(1), 205–219.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- Hakim, T., & Rahayu, S. (2022). *Penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia: Studi efektivitas dan tantangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, D. (2014). *Innovative policing models and the role of indigenous knowledge in security*. *International Journal of Security Studies*, 7(4), 200–222.
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis: Where are we now? A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215–251.
- Hidayati, N., Satria, B., & Kusuma, R. (2021). *Kearifan lokal dan konservasi lingkungan di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage.
- Marmot, M. (2015). *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World*. Bloomsbury Publishing.
- Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 327–344.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage.

- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Belknap Press.
- Pitana, G., & Setiawan, I. (2020). *Subak sebagai sistem irigasi berbasis kearifan lokal: Perspektif ekologi dan budaya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Prasetyo, C. (2016). *Collaborative approaches in law enforcement: Lessons from Papua*. *Journal of Community Policing*, 10(3), 156–178.
- Putra, F. (2020). *Local wisdom and modern policing: Navigating security challenges in Papua*. *Journal of Indonesian Security Policy*, 15(2), 99–120.
- Santoso, B. (2015). *Policing and community empowerment: Integrating local wisdom in conflict zones*. *Indonesian Journal of Public Safety*, 8(1), 88–107.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W. W. Norton & Company.
- Suryanto, A. (2013). *Strategi kepolisian dalam konteks kearifan lokal di Kabupaten Keerom*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 45–67.
- Wulandari, E. (2018). *Sustainable security strategies: The importance of cultural integration in law enforcement*. *Journal of Criminological Research*, 12(1), 34–56.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.